



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 000.8.6/KeP.386-0rg/VII/2025
TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan capaian nilai Reformasi Birokrasi baik di tingkat kota maupun di tingkat perangkat daerah, perlu dibuatkan ketentuan dalam pelaksanaannya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	<i>Ri</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>t</i>

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 000.8.1/148/SETDA.Org tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Rapat Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	<i>Ra</i>
Kepala Bagian Hukum	✓

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan melalui penetapan Indikator dan target kinerja serta perangkat daerah pengampu indikator, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sebagaimana Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Untuk memastikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran III Keputusan Wali Kota ini, yang terdiri dari:
- Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RG General dan RB Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 - Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi *General* merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan RB General;
 - Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi *Tematik* merupakan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan RB Tematik; dan
 - Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi atau dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	


TRI ADHIANTO TJAHYONO

- Tembusan Yth :
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 900.5.6/Keputusan.386-0rg/VII/2025
 TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

INDIKATOR, TARGET DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BEKASI TAHUN 2025

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
I.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik				
1	Persentase Angka Penduduk Miskin		4,01	3,34 - 3,36	Bappelitbangda
2	Nilai Realisasi Investasi		13,7 T	14,6 T	DPMPSTSP
3	Prevalensi Stunting		11,7	11,5	DPPKB
4	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri		96%	96%	Disdagperin
5	Laju Inflasi		1,6	2,5 ± 1	Setda
II.	Nilai Reformasi Birokrasi General				
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	3	4	Setda
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,83	3,90	Diskominfostandi
		Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	3	4	Diskominfostandi
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	67,33	67,50	Bappelitbangda, Setda dan Inspektorat Daerah
4	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0,5	0,75	Inspektorat Daerah
5	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	2,8	3,00	Inspektorat Daerah
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	2	3,00	Diskominfostandi
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	63,26	63,50	Inspektorat Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Kegiatan Utama	Indikator	Capaian 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4	5	6
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	76,42	77,00	Bappelitbangda
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	98,66	98,70	Setda
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	93	93,50	Disarpusda
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,7	2,75	Diskominfostandi
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	88,2	88,50	Setda
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	2,25	3,00	BPKAD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	87,25	87,50	Inspektorat Daerah
14	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	334,5	335	BKPSDM
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	77,76	78,00	BKPSDM
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,02	88,10	Setda
		Indeks Pelayanan Publik	4,58	4,60	Setda
III.	NILAI INDEKS RB INSTANSI PEMERINTAH		83,46	84	Setda

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADMIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.3.6/Kep.386-Org/VII/2025
 TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
 TAHUN 2025

1. Indikator, Nilai dan Evaluator:

a. Lingkup Sekretariat/Dinas/Badan:

Indikator Penilaian		Nilai	Evaluator
1.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>General</i> Perangkat Daerah	0-100	
1.1	Rencana Aksi/Rencana Kinerja Perangkat Daerah	0-100	Bappelitbangda
1.2	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	0-100	Inspektorat Daerah
1.3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0-100	BPKAD
1.4	Nilai Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
1.5	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda
1.6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	0-100	BKPSDM
1.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan (LAPOR)	0-100	Diskominfostandi
1.8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0-100	Inspektorat Daerah
1.9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat Daerah
1.10	Evaluasi Kebijakan Publik	0-100	Bappelitbangda
1.11	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
1.12	Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	0-100	BKPSDM
1.13	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	Disarpusda
1.14	Tingkat Kematangan SPBE	0-100	Diskominfostandi
1.15	Nilai Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Diskominfostandi
1.16	Indeks Reformasi Hukum	0-100	Bagian Hukum Setda
1.17	Indikator Evaluasi RB lainnya	0-100	Indikator bersifat opsional
II.	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah	0-100	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Indikator Penilaian		Nilai	Evaluator
2.1	Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	0-100	Bappelitbangda
2.3	Capaian Pelaksanaan Birokrasi Dampak Reformasi	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		0-100	

b. Lingkup Kecamatan:

Indikator Penilaian		Nilai	Evaluator
I.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>General</i> Perangkat Daerah	0-100	
1.1	Rencana Aksi/ Rencana Kinerja Perangkat Daerah	0-100	Bappelitbangda
1.2	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	0-100	Inspektorat Daerah
1.3	Laporan Realisasi APBD	0-100	BPKAD
1.4	Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	Bagian Organisasi Setda
1.5	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda
1.6	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	BKPSDM
1.7	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	0-100	Diskominfostandi
1.8	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0-100	Inspektorat Daerah
1.9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0-100	Inspektorat Daerah
1.10	Nilai Realisasi Kinerja PBB Perkotaan & Perdesaan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan Setda
1.11	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
1.12	Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	0-100	BKPSDM
1.13	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	Disarpusda
1.14	Tingkat Penerapan SPBE	0-100	Diskominfostandi
1.15	Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan	0-100	Bagian Tata Pemerintahan Setda
1.16	Evaluasi Pelaksanaan KADARKUM	0-100	Bagian Hukum Setda
1.17	Indikator Evaluasi RB lainnya	0-100	Indikator bersifat opsional

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Indikator Penilaian		Nilai	Evaluator
II.	Nilai Reformasi Birokrasi <i>Tematik</i> Perangkat Daerah	0-100	
	2.1 Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
	2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	0-100	Bappelitbangda
	2.3 Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0-100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		0-100	

2. Kriteria Penilaian

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak yang luas terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
2.	A	>80 - 90	Memuaskan	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, namun belum memberikan dampak terhadap

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
				penyelesaian permasalahan yang menjadi core business-nya.
4.	B	>60 - 70	Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Perangkat Daerah.
6.	C	>40 - 50	Kurang Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil aparatur sipil negara di Perangkat Daerah.
7.	D	0 - 40	Tidak Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi belum terlaksana.

3. Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. PTU Sekretariat/ Dinas/ Badan:

1. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
3. Sekretaris selaku asesor : Kepala Sub Bagian pada Bagian
Perangkat Daerah Umum Sekretariat Daerah/Pejabat
Pengawas pada Sekretariat
Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi Tata Usaha
4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi :
 - 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 3) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Pejabat Fungsional Perencana/
Analisis Perencanaan
 - 4) Laporan Realisasi Anggaran : Kasubag Keuangan/Bendahara
Pengeluaran/Pengelola Keuangan
 - 5) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP : Kasubag Keuangan/Bendahara
Pengeluaran/Pengelola Keuangan
 - 6) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ & Kepatuhan Realisasi P3DN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/
Pejabat Pengadaan (PP) Perangkat
Daerah
 - 7) Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- 8) Nilai IP ASN : Layanan/Pengelola Data
Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Analis SDM
Aparatur/Pengelola Kepegawaian
- 9) Indeks BerAKHLAK : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Analis SDM
Aparatur/Pengelola Kepegawaian
- 10) Tingkat Digitalisasi Arsip : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Arsiparis/
Pengelola Arsip
- 11) Tindaklanjut SP4N-Lapor : Pejabat PPID/Pengelola Layanan
Pengaduan
- 12) Tingkat Kematangan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata
Komputer/Pengelola SPBE
Perangkat Daerah
- 13) Evaluasi Kualitas Kebijakan Publik : Kepala Bagian/Kepala Bidang
pemrakarsa penyusunan kebijakan
publik/regulasi
- 14) Evaluasi Kualitas Produk Hukum : Kepala Bagian/Kepala Bidang
pemrakarsa penyusunan produk
hukum / Analis Hukum
- 15) Evaluasi Pelayanan Publik : Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Kepala UPTD yang melaksanakan
fungsi pelayanan
- 16) Tingkat Pembangunan Zona Integritas : Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Kepala UPTD yang melaksanakan
fungsi pelayanan
- b. PTU Lingkup Kecamatan:
1. Penanggung jawab : Camat
 2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 3. Sekretaris selaku asesor : Sekretaris Kecamatan atau Pegawai
yang ditunjuk untuk menyampaikan
penilaian mandiri
 4. Pengampu Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah :
 - 1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analis Perencanaan
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analis Perencanaan
 - 3) Laporan Realisasi Anggaran : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analis Perencanaan
 - 4) Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP : Kasubag Program dan Keuangan/
Pejabat Fungsional Perencana/
Analis Perencanaan
 - 5) Nilai Pemanfaatan Sistem PBJ dan Kepatuhan Realisasi P3DN : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/
Pejabat Pengadaan (PP) Kecamatan
 - 6) Nilai IP ASN : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola
Layanan/Pengelola Data
 - 7) Indeks BerAKHLAK : Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional/Pengelola

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	<i>Ru</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>E</i>

- 8) Tingkat Digitalisasi Arsip : Layanan/Pengelola Data
Kasubag Umum dan Kepegawaian/
Pejabat Fungsional Arsiparis/
Pengelola Arsip
- 9) Tindaklanjut SP4N-Lapor : Pejabat PPID/Pengelola Layanan
Pengaduan
- 10) Evaluasi Pembinaan dan : Kepala Seksi Pemerintahan
Pengawasan Pemerintah dan/atau Kepala Seksi
Desa/Keluarahan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 11) Evaluasi Kinerja Realisasi : Kepala Seksi Pemerintahan
PBB Perkotaan & dan/atau Kepala Seksi
Perdesaan Kesejahteraan Rakyat
- 12) Evaluasi Pelaksanaan : Kepala Seksi Ketentraman dan
Kelompok Sadar Hukum Ketertiban dan/atau Kepala Seksi
Pemerintahan
- 13) Tingkat Penerapan SPBE : Pejabat Fungsional Pranata
Komputer/Operator Pengelola
Sistem di Kecamatan
- 14) Evaluasi Pelayanan Publik : Kepala Seksi Pelayanan
- 15) Nilai Pelaksanaan Survey : Kepala Seksi Pelayanan
Kepuasan Masyarakat
- 16) Tingkat Pembangunan : Kepala Seksi Pelayanan
Zona Integritas

5. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab PTU

a. Tugas PTU sebagai berikut:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana kinerja/rencana aksi Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan dan melaporkan capaian kinerja/capaian rencana aksi Perangkat Daerah;
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Perangkat Daerah; dan
- 4) melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Wewenang PTU sebagai berikut:

- 1) menetapkan Rencana Kinerja/Rencana Aksi Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- 2) menetapkan hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

c. Tanggung jawab PTU sebagai berikut:

- 1) melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah; dan
- 2) menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi melalui Aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 099.3.6/Kep.386-0rg/VII/2025
 TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BEKASI TAHUN 2025

1. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH DAERAH

UNSUR PENGARAH

Ketua	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota Bekasi
Anggota	1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3. Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi Umum

UNSUR PELAKSANA

1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
2.	Ketua <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
3.	Koordinator Pelaksanaan RB General	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi
4.	Koordinator Pelaksanaan RB Tematik	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
5.	Sekretaris <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
6.	Anggota <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU)	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kota Bekasi 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Bekasi 4. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bekasi 5. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi 7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi 8. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika,

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

		Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
7.	<i>Leading Institution/</i> Penanggungjawab Pengampu Indikator Pelaksanaan RB General	
	1) Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	2) Indeks SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	3) Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	4) Nilai SAKIP	
	- Perencanaan Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	- Pengukuran Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	- Pelaporan Kinerja	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	- Evaluasi Internal	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	5) Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	6) Tingkat Maturitas SPIP	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	7) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR)	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	8) Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	9) Indeks Kualitas Kebijakan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	10) Indeks Reformasi Hukum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	11) Tingkat Digitalisasi Arsip	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
	12) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
	13) Indeks Tata Kelola Pengadaan	Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

	14) Opini BPK	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bekasi
	15) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	16) Indeks Sistem Merit	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	17) Indeks Berakhlak	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
	18) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	19) Indeks Pelayanan Publik	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	20) Nilai Realisasi Kinerja PBB Perkotaan	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
	21) Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
8.	<i>Leading Sector</i> /Koordinator Pengampu Pelaksanaan RB Tematik	
	a Pelaksana RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bekasi
	b Pelaksana RB Tematik Peningkatan Investasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
	Anggota	Tim Percepatan Investasi Daerah Kota Bekasi
	c Pelaksana RB Tematik Pengendalian Inflasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bekasi
	d Pelaksana RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Percepatan Penurunan Stunting	
	Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
	Anggota	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

	e Pelaksana RB Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi
	Anggota	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bekasi
9.	Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah	
	Ketua Tim Evaluasi Internal	Inspektur Daerah Kota Bekasi
	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bekasi
	Ketua Pelaksana Harian	Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
	Anggota	Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
1.	Pengarah	<p>a. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Menetapkan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
2	Penanggungjawab Pelaksana RB	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>b. Menyusun dan Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah; dan</p> <p>b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Evaluasi Nasional pada Bulan Oktober setiap tahunnya.</p> <p>c. Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota</p>

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
3	Ketua <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memimpin Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4	Koordinator Pelaksana RB General	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi pengampu indikator kinerja dalam pelaksanaan RB General	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
5	Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengkoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik dalam pelaksanaan RB Tematik	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
6	Sekretaris <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
7	Pengampu Indikator RB General	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; b. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan d. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>; dan b. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>.
8	Pengampu Indikator RB Tematik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; b. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

No	Tim Pelaksana	Tugas	Tanggungjawab
		<p>c. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.</p>	Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
9	Tim Penilai Internal (TPI)	<p>a. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.</p>	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO